

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R., Khair, J., & Lysandra, S. (2016). Characteristics and political connection to local government performance. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(2), 1-14.
- Arens, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley. 2008. *Auditing and Assurance Services*, Twelfth Edition. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017. Diakses pada tanggal 11 April 2022. Melalui <http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/I/ihpsi20171507002855.pdf>.
- Effendy, Y. (2013). Tinjauan hubungan opini WTP BPK dengan kasus korupsi pada pemda di Indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (auditor). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU*, 13(1).
- Heriningsih, S., & Marita, M. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 67–78.
- Jensen, M, C, dan W. Meckling. (1976). *Theori of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. *Journal of finance economic* 3:305-360
- Madelia, M. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Jumlah Anggota Legislatif dan Opini Audit BPK Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3(1), 16–26. <https://doi.org/10.22437/jaku.v3i1.4845>
- Probahudono, A. N. (2015). Analisis audit BPK RI terkait kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 1(1), 81-110.
- Rahmawati, D. (2017). Pengaruh Karakteristik Inspektorat Daerah terhadap Opini Audit BPK Atas Lkpd Kabupaten/Kota di Indonesia (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

- Rustiyaningsih, S., & Immanuela, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. *Widya Warta*, 2(2).
- Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan.
- Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 101-124.
- Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. (2012). *Statistika untuk penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 14, 17.
- Vandervelde, S. D., Tubbs, R. M., Schepanski, A., & Messier Jr, W. F. (2009). Experimental tests of a descriptive theory of combined auditee risk assessment. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 28(2), 145-169.
- Wardhani, R., Rossieta, H., Martani, D., & Djamaluddin, S. (2017). The Role of Good Governance in Public Sector in Increasing the Government Expenditure Efficiency and Performance of Local Government: The Case of Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77-102.

